

ANALISIS MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA LEPPE KECAMATAN SOROPIA

ANALYSIS OF DEVELOPMENT COMMUNICATION MODEL IN COASTAL COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH HOUSEHOLD WORTH DEVELOPMENT PROGRAMS IN THE LEPPE VILLAGE, SOROPIA DISTRICT

Nurul Afni Triwahyuni¹, Anwar Bey², M. Najib Husein³

- 1) Alumni Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana UHO, e-mail: nurulafnitriwahyuni@gmail.com
- 2) Dosen Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana UHO, e-mail: abeyalgopacks@gmail.com
- 3) Dosen Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana UHO, e-mail: najib_75husain@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Proses Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Leppe, Kecamatan Soropia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan informan yang berjumlah sebanyak 14 orang yang ditentukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi perangkat desa ke masyarakat nelayan berbeda-beda, masyarakat nelayan juragan mendapatkan informasi langsung dari kepala desa, masyarakat nelayan buruh ada yang mendapatkan informasi dari perangkat desa, rekan sesama buruh nelayan dan dari nelayan juragan. Sedangkan bagi masyarakat nelayan perorangan, sebagian mendapatkan informasi dari perangkat desa dan sebagian lainnya mendapatkan informasinya dari hanya sesama rekan nelayan perorangan saja. Hal ini menyebabkan kuantitas dan kualitas informasi yang didapatkan masyarakat tergantung pada mata pencahariannya.

Kata Kunci: Proses Komunikasi, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Development Communication Process in the Empowerment of Coastal Communities through the Livable Housing Development Program in Leppe Village, Soropia District. This research is a qualitative descriptive study with 14 informants determined by purposive sampling. Data collection techniques were carried out by means of in-depth interviews, observation and documentation study. Data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation and conclusion drawing / verification. The results of this study show that the process of communication between village officials to the fishing community is different, the

fishermen community gets information directly from the village head, there are fishermen fishing communities who get information from the village office, fellow fishermen and fishermen. As for the individual fishing community, some get information from village officials and some get information from only their fellow fishermen. This causes the quantity and quality of information obtained by the community depends on their livelihood.

Keywords: *Procces Communication, Empowerment, Coastal Communities*

PENDAHULUAN

Masyarakat Pesisir merupakan suatu kumpulan manusia yang memiliki pola hidup, tingkah laku, dan karakteristik tertentu yang tinggal di wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Masyarakat pesisir cenderung bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhannya dari sumber hasil laut yakni perikanan, Artinya bahwa kehidupan nelayan masih menggantungkan nasib kepada hasil laut yang semakin sulit sebagai sarana para nelayan memperbaiki kualitas hidupnya. Dari observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa disisi lain hasil tangkapan yang merupakan sumber utama dijual bukan kepada konsumen langsung tapi kepada tengkulak atau kepada nelayan lain yang kondisi ekonomi lebih baik (bakul ikan atau pedagang ikan), yang mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai pedagang ikan dan rentenir. Nelayan buruh harus menjual ikannya dengan harga yang sangat murah kepada Juragan (pengumpul) sebagai kompensasi pinjaman, kondisi ini yang menjerat leher nelayan buruh yang mau tidak mau harus dijalani demi kehidupan dan di sisi lain mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi.

Dari sisi kesejahteraan, data statistik sumberdaya laut dan pesisir tahun 2018 menunjukkan bahwa populasi masyarakat pesisir diperkirakan mencapai 16,42 juta jiwa dan mendiami 8090 desa. Kondisi umum masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang tertinggal secara ekonomi dan sosial (khusus dalam hal akses pendidikan, dan layanan kesehatan), Dan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa indikator seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus Sekolah Menengah Pertama atau belum tamat sekolah, hingga tempat tinggal mereka tidak cukup memadai untuk dijadikan hunian.

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 diharapkan dapat memberikan arahan bagi terwujudnya tujuan sebagai berikut memperbaiki mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan memperkuat kelembagaan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip keterpaduan dan kelestarian. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Nasional yang dilakukan melalui pembangunan Nasional terpadu, maka pembangunan sektor ekonomi mutlak diperlukan yaitu pembangunan ekonomi yang berimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan pengelolaan wilayah pesisir yang maju dengan sasaran untuk menaikkan tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Seperti pada Undang-undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini mempunyai arti penting dalam kerangka pembangunan nasional di bidang kelautan. UU ini hendak menciptakan tata kelola pesisir yang lebih baik.

Desa Leppe merupakan salah satu desa dari 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Dari hasil observasi awal, di Desa Leppe memiliki jumlah kartu keluarga mencapai kurang lebih 170. Kecamatan Soropia khususnya Desa Leppe adalah wilayah kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah baik sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) di perikanan kelautan. Pembangunan pesisir, seharusnya memiliki nilai tambah sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan mendukung daya saing masyarakat kecamatan soropia khususnya Desa Leppe, sehingga memungkinkan terjadinya kemandirian daerah. Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektifitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan dan bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya Perangkat Desa Leppe dalam memberikan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan Pembangunan Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2022, yang di targetkan untuk seluruh Kartu Keluarga (KK) di Desa Leppe. Yaitu sekitar kurang lebih 170 Kartu Keluarga (KK), dan belum termasuk KK baru. Aparat Desa Leppe, dalam pembangunan terlebih dahulu melakukan sosialisasi ke seluruh warga, mereka berkumpul di balai desa lalu menceritakan alur pembangunan yang akan direalisasikan untuk warga. Menurut kepala desa, sosialisasi tersebut dilakukan hanya sekali saja dan setelah itu pembangunan dilaksanakan oleh aparat desa tanpa melibatkan saran-saran dari masyarakat. Masyarakat hanya menerima bantuan saja, yaitu pemberian bahan bangunan secara bertahap. Seperti semen, genteng, kayu, dan lain-lain. Proses pemberian bahan bangunan yang dilakukan satu persatu, dan yang mengerjakan ialah pemilik rumah sendiri. Dan tanpa melalui, kesepakatan dari pemilik rumah karena bahan bangunannya langsung diletakkan di depan rumah warga. Hal inilah yang memicu masyarakat seperti acuh tak acuh pula dalam pembangunan tersebut. Seperti yang diungkapkan salah satu warga bahwa, mereka tidak dimintai saran terkait pembangunan, bahan bangunan langsung disimpan oleh aparat desa di depan rumah mereka. Dan pada akhirnya pembangunan tersebut berjalan tanpa target, setelah peneliti beberapa kali berkomunikasi dengan kepala desa beserta aparat desa yang lain, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang sedang dihadapi aparat desa salah satunya masalah komunikasi, yaitu komunikasi yang dijalankan aparatur desa dengan masyarakat pesisir belum dua arah sehingga masyarakat belum berpartisipasi atau bergotong royong bersama-sama menjalankan pembangunan. Padahal sejatinya pembangunan tersebut guna untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang lebih baik.

Melihat kenyataan belum optimalnya komunikasi dua arah yang dibangun dalam rangka pembangunan Rumah Layak Huni yang dijalankan oleh aparatur Desa, maka dipandang perlu menganalisis lebih dalam model komunikasi pembangunan yang diadopsi oleh aparatur desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program pembangunan rumah layak huni karena sejauh ini komunikasi adalah bagian integral dari aktivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan, terutama yang berhubungan dengan proses penyediaan barang-barang publik (*public goods*), diantaranya prasarana perdesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Pembangunan

Nasution (1992) mengemukakan bahwa komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf social dan ekonomi, yang secara umum berlangsung dalam Negara sedang berkembang. Effendy (2006) mengartikan komunikasi pembangunan sebagai proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan lahiriah dan kepuasan batiniah. Komunikasi pembangunan merupakan proses interaksi seluruh warga masyarakat (aparatur pemerintah, penyuluh, tokoh masyarakat, LSM, Individu atau kelompok/organisasi social) untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi melalui proses perubahan terencana demi tercapainya mutu-hidup secara berkesinambungan, dengan menggunakan teknologi atau menerapkan ide-ide yang sudah terpilih. Komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik – diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan.

Proses Komunikasi

Komunikasi tidak bisa terlepas dari proses. Oleh karena itu apakah suatu komunikasi dapat berlangsung dengan baik atau tidak tergantung dari proses yang berlangsung tersebut. Menurut Ruslan (2002) proses komunikasi adalah sebagai “transfer informasi” atau pesan-pesan (*message*) dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan (*feed back*) untuk mencapai saling pengertian (*mutual understanding*) atau antar kedua belah pihak.

Menurut Ruslan (2003) komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat internal baik masyarakat pada pemerintahan dan sebaliknya sedangkan komunikasi eksternal menurut Ruslan (2002) merupakan komunikasi yang sangat diperlukan oleh pemerintah dalam pembentukan citra pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang benar. Agar komunikasi efektif, proses penyandian oleh komunikator harus bertautan dengan proses pengawasaan sandian oleh komunikan. Effendy (2006) melihat pesan sebagai tanda esensial yang harus dikenal oleh komunikan. Semakin tumpang tindih bidang pengalaman (*field of experience*) komunikator dengan bidang pengalaman komunikan, akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan.

Masyarakat Pesisir

Menurut Prianto (2005) masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat yang hidup di kota-kota atau

permukiman pesisir memiliki karakteristik secara sosial ekonomis sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah laut. Demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim. Masyarakat pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Wilayah Pesisir berada pada perbatasan laut dan darat (Mongkito, dkk., 2019).

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dkk (2013) pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lainnya. Menurut World Bank dalam Mardikanto dkk (2013) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya

Konsep Rumah Layak Huni

Menurut Zulfie (2000) Rumah Layak Huni merupakan tempat tinggal yang memadai dan layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin atau ancaman – ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus terjamin, komite mendorong Negara untuk secara menyeluruh menerapkan rumah layak huni atau rumah sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi - kondisi penyebab penyakit berdasarkan analisis epidemiologi yaitu tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu dikaitkan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe, khusus nya di Desa Leppe dengan pertimbangan bahwa Desa Leppe memiliki rancangan pembangunan Rumah Layak Huni dan pada rancangan tersebut memiliki masalah Komunikasi

pembangunan yang cukup kompleks di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan dan analisis kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 yang terdiri dari 8 orang dari aparat Desa dan 6 orang dari kalangan masyarakat pesisir yang mendapatkan bantuan program rumah layak huni. Informan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini berfokus pada Model komunikasi antara Aparatur desa dengan masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Leppe, Kecamatan Soropia. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah desa setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan melalui proses komunikasi yang melibatkan pemerintah Desa, BPD dan lembaga-lembaga masyarakat.

Perangkat Desa Leppe selaku Penanggung Jawab pelaksana Program ini di Desa Leppe dituntut agar program pembangunan ini dilaksanakan secara merata, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Sebab salah satu tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut, Perangkat Desa Leppe melakukan upaya-upaya komunikasi baik internal maupun eksternal. Komunikasi internal terjalin antara sesama perangkat desa (baik dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan dan sesama bawahan). Adapun komunikasi eksternal yaitu komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses komunikasi ini sebab masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan ini. Tanpa ada bantuan dan kerjasama yang baik dari masyarakat maka program ini akan sulit berjalan.

1. Proses Komunikasi Internal Perangkat Desa Leppe

Komunikasi internal yang dilakukan perangkat desa adalah komunikasi yang terjalin antara perangkat desa dengan perangkat desa, baik dari kepala desa ke Kepala Seksi ataupun antar sesama kepala seksi. Proses komunikasi ini dilakukan dengan dua cara yaitu proses tatap muka yang sering disebut dengan komunikasi langsung dan proses komunikasi bermedia. Dari kedua jenis proses komunikasi tersebut komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang paling sering dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam berkomunikasi. Bentuk komunikasi langsung yang dilakukan seperti rapat, laporan hingga komunikasi non formal *face to face*. Hal ini seperti yang dikatakan Kepala Desa Leppe (Pak Hajar) bahwa:

“Pesan tentang pembangunan rumah layak huni di desa Leppe ini disampaikan ke semua perangkat desa pertama kali melalui forum rapat rutin desa yang dilakukan setaip minggu. Pembahasan lebih lanjut terkait perkembanganya

dibahas pada rapat-rapat selanjutnya, sedangkan apabila ada laporan-laporan atau himbauan baru menyangkut proses pembangunan ini biasa disampaikan dengan komunikasi dua arah face to face antara staff desa dan kepala desa”(Wawancara, tanggal 16 April 2019).

Pernyataan tersebut mengungkapkan bentuk-bentuk komunikasi langsung yang dilakukan pada internal Perangkat Desa Leppe. Rapat rutin adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan dihadiri oleh semua anggota perangkat desa Leppe, rapat ini biasa diadakan setiap dua minggu sekali. Komunikasi yang terjadi dalam rapat cenderung satu arah, dimana staff desa sebagai komunikator dominan hanya mendengarkan pesan yang disampaikan kepala desa terkait definisi program dan langkah-langkah untuk merealisasikannya. komunikasi kepala desa, Aparat Desa dan Masyarakat dalam program pembangunan rumah layak huni yang sejalan pula dengan ungkapan Komala (2014) bahwa komunikasi dianggap sebagai suatu proses berbagi informasi untuk mencapai saling pengertian atau kebersamaan. Dalam hal ini pengertian antara kepala desa, aparat desa Leppe dengan masyarakat. Adapun, komunikasi dua arah yang dimaksud adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan untuk lebih memahami keadaan, khususnya untuk mengetahui laporan harian staff desa terkait perkembangan atau kendala yang dihadapi dari program pembangunan ini.

Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan Suharsono (2012) bahwa proses komunikasi berdasarkan situasi dan jumlah orang yang terlibat dalam proses tersebut memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, sehingga berangkat konsep ini perangkat Desa Leppe dalam melakukan komunikasi dalam program pembangunan rumah layak huni harus bertahap pula. Kemudian hal ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Sulaiman (2013) bahwa komunikasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sosialisasi dapat dilakukan secara personal maupun luas. Dalam sosialisasi aparat Desa Leppe melakukan sosialisasi secara terbuka dengan mengundang seluruh masyarakat agar masyarakat dapat memahami tujuan dari program pembangunan rumah layak huni.

Di dalam lingkup perangkat Desa Leppe, komunikasi diupayakan agar selalu berimbang dan menjadi sarana untuk menyatukan visi organisasi dan agar baik kepala desa dan para staff selalu berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Perangkat Desa Leppe selalu berupaya untuk mengembangkan iklim kerja dan komunikasi yang selaras dan berimbang. Namun, menurut peneliti upaya tersebut belum terealisasi dengan baik. Untuk itu peneliti melihat keterbukaan dengan sesama perangkat desa dirasakan perlu untuk menciptakan komunikasi internal yang kondusif, hal ini terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Nurhadi dan Kurniawan (2017) bahwa pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan diperlukan adanya strategi komunikasi, jangkauan pesan komunikasi, perencanaan, pesan komunikasi dan etos komunikator.

2. Proses Komunikasi Eksternal Perangkat Desa Leppe

Umumnya, komunikasi eksternal berlangsung secara timbal balik yaitu komunikasi dari Perangkat Desa ke khalayak dan komunikasi dari khalayak ke Perangkat Desa. Khalayak dalam penelitian ini diartikan sebagai seluruh masyarakat desa Leppe tanpa membedakan golongannya. Masyarakat desa Leppe, seperti yang disebutkan sebelumnya, 59,5% bermata pencaharian sebagai nelayan. Penelitian ini

akan berfokus pada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Leppe. Menurut data yang didapatkan, masyarakat nelayan di Desa Leppe dapat dikelompokkan ke dalam tiga, nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan

Berdasarkan tiga pembagian kelompok masyarakat nelayan di Desa Leppe yang tersebut di atas, maka dalam pembahasan komunikasi eksternal perangkat desa Leppe ini, tentu berkaitan dengan komunikasi yang dibangun dengan masyarakat nelayan tersebut. Ketiga pembagian golongan masyarakat di atas memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perangkat desa menyukseskan jalannya program pembangunan rumah layak huni. Seluruh masyarakat harus terlibat dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, salah satu unsur yang dapat mendukung terjalannya kerjasama yang baik adalah komunikasi. Wujud komunikasi eksternal perangkat Desa Leppe salah satunya tercermin dari proses komunikasi yang terjalin antara kepala desa dengan Nelayan Juragan. Upaya komunikasi yang dilakukan kebanyakan berlangsung dalam forum non-formal melalui komunikasi langsung *face to face*.

Informasi yang didapatkan Nelayan juragan memiliki kredibilitas yang tinggi karena bersumber dari kepala desa langsung. Seperti penjelasan yang dikatakan Kepala Desa (Pak Hajar), bahwa:

“Informasi program pembangunan rumah layak huni, saya sebar pula ke nelayan juragan terlebih dahulu, agar pesan pembangunan tersebut dapat segera tersebar ke masyarakat lain melalui nelayan juragan, dimana mereka memiliki nelayan buruh sebagai bawahannya” (Wawancara, tanggal 13 September 2019).

Berdasarkan dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa sebagai perangkat desa, kepala desa memiliki kedekatan hubungan dengan masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan Juragan. Sehingga selain menyampaikan kepada para staffnya, kepala desa juga menyampaikan pesan program pembangunan ini kepada nelayan juragan sebelum pada akhirnya informasi tersebut disebar luas ke masyarakat yang lain

Disamping melakukan komunikasi eksternal ke masyarakat yang tergolong dalam kelompok nelayan juragan. Perangkat Desa Leppe juga melakukan komunikasi eksternal ke kelompok masyarakat lainnya, yaitu; masyarakat nelayan buruh, dan masyarakat nelayan perorangan. Komunikasi eksternal ini berlangsung antara staff desa dengan masyarakat hanya melalui komunikasi tatap muka yang direalisasikan dalam musyawarah desa (Musdes). Seperti yang disampaikan Kepala Desa (Pak Hajar) pada saat wawancara tentang bagaimana pesan permbangunan ini disampaikan ke masyarakat:

“Kami selalu adakan musyawarah desa setiap sebulan sekali biasanya disampaikan oleh staff desa, agar masyarakat mengetahui program-program bantuan desa Leppe, dan juga agar mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan rumah layak huni ini. Karena jujur saja, tanpa bantuan masyarakat, kami juga tidak bisa melaksanakan program ini secara merata. Paling tidak, agar masyarakat mengerti bahwa pembangunan ini tidak langsung merata jadi memang masyarakat kami beritahukan agar bersabar menunggu

giliran untuk diberikan bantuan berupa pembangunan rumah” (wawancara, 13 September 2019)

Dari pernyataan tersebut diatas diketahui bahwa perangkat desa sebagai komunikator menyampaikan pesan berupa informasi program, serta himbuan kepada masyarakat melalui komunikasi langsung yang dilakukan pada saat musyawarah desa. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melihat bahwa, masih ada ketidakmerataan penyebaran pesan-pesan pembangunan oleh perangkat desa ke masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya informasi pelaksanaan musyawarah maka tidak semua masyarakat hadir.

Dalam mencari informasi terkait proses komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat nelayan perorangan, peneliti menemukan adanya perbedaan pernyataan dari pihak perangkat desa dan masyarakat. Apabila mengutip pernyataan yang dikatakan Kepala Desa (Pak Hajar), ia mengatakan bahwa:

“Kami selalu adakan musyawarah desa setiap sebulan sekali biasanya disampaikan oleh staff desa ataupun para KASI, agar masyarakat mengetahui program-program bantuan desa Leppe, dan juga agar mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan rumah layak huni ini. Karena jujur saja, tanpa bantuan masyarakat, kami juga tidak bisa melaksanakan program ini secara merata. Paling tidak, agar masyarakat mengerti bahwa pembangunan ini tidak langsung merata jadi memang masyarakat kami beritahukan agar bersabar menunggu giliran untuk diberikan bantuan berupa pembangunan rumah” (Wawancara, tanggal 13 September 2019)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perangkat desa sebagai komunikator menyampaikan pesan berupa informasi program, serta himbuan kepada masyarakat melalui komunikasi langsung melalui forum formal musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat dengan tujuan; agar masyarakat mengetahui program bantuan desa, masyarakat mengetahui peran fungsinya, dan pemberian pemahaman serta kesabaran karena pembangunan dilakukan secara bergilir sehingga tidak bisa langsung merata. Hal ini berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Kholil (2017) yang mengungkapkan bahwa proses penyebaran pesan oleh seseorang atau kelompok kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkat kemajuan.

Dari uraian-uraian di atas dapat terlihat jelas adanya perbedaan proses komunikasi yang terjalin diantara masyarakat Desa Leppe dengan perangkat desa. Perbedaan ini terjadi berdasarkan jenis mata pencaharian yang dimiliki. Jika semakin tinggi posisi yang dimiliki seseorang, seperti juragan maka kualitas pesan dan sumber pesan akan semakin baik, jika dibandingkan dengan masyarakat yang bermata pencaharian lebih kecil seperti nelayan buruh dan perorangan. Hal ini juga disampaikan oleh Amanah (2010) bahwa peran penting dan proses komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah menjembatani kesenjangan yang terjadi antara kondisi masyarakat saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai melalui proses-proses komunikasi yang partisipatif, dialogis, dan memotivasi. Sehingga dapat dilihat bahwa di Desa Leppe, perangkat desa merupakan penghubung program – program kepada masyarakat pesisir di Desa Leppe.

Perbedaan proses komunikasi yang terjadi pada masyarakat nelayan buruh dan perorangan, pada akhirnya mempengaruhi kualitas pesan yang mereka terima. Menurut pandangan peneliti, hal ini justru menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab program pembangunan rumah layak huni di Desa Leppe pada hakikatnya, ditujukan kepada semua lapisan masyarakat Desa Leppe akan tetapi perhatian perangkat desa lebih tertuju ke nelayan juragan saja, padahal seharusnya masyarakat nelayan buruh dan perorangan merupakan target pembangunan yang perlu di prioritaskan, yang dalam hal ini rumah merekalah yang akan dibangun atau direnovasi terlebih dahulu yang jika ditinjau dari rumah masing-masing masyarakat, nelayan perorangan dan nelayan buruh memiliki hunian yang tidak layak huni. Hal seperti apa yang diungkapkan oleh Koswara & Mulyana (2016) bahwa masalah permukiman yang dalam hal ini adalah perbaikan rumah tidak layak huni. Program ini berlangsung tidak terlepas dari berbagai aspek yang terkait didalamnya selain pertumbuhan penduduk, lemahnya kemampuan masyarakat dalam aspek ekonomi. Peran fungsi masyarakat nelayan juragan, buruh dan perorangan sangat penting dalam program pembangunan ini, Dan perlu diketahui pula, pemerataan informasi mengenai pembangunan harus merata tanpa memandang profesi masyarakat, namun faktanya proses komunikasi yang terjalin dengan mereka tidak berjalan dengan baik, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kifli (2007) bahwa berbagai bentuk materi yang dilakukan belum mampu dapat dipahami atau diakses oleh masyarakat desa baik itu komunikasi dari luar maupun dalam, Kemudian juga keterkaitan dengan ungkapan Idris (2002) yang menyatakan bahwa para komunikator terlebih dahulu melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga iklim komunikasi berjalan secara dinamis dan apa yang diinginkan masyarakat lebih mudah dipahami.

SIMPULAN

Proses komunikasi perangkat desa ke masyarakat nelayan berbeda-beda, masyarakat nelayan juragan mendapatkan informasi langsung dari kepala desa, masyarakat nelayan buruh ada yang mendapatkan informasi dari perangkat desa, rekan sesama buruh nelayan dan dari nelayan juragan. Sedangkan bagi masyarakat nelayan perorangan, sebagian mendapatkan informasi dari perangkat desa dan sebagian lainnya mendapatkan informasinya dari hanya sesama rekan nelayan perorangan saja, selain itu juga masyarakat pesisir di Desa Leppe Kecamatan Soropia belum begitu dapat menerima informasi secara menyeluruh dari para aparat desa sehingga, aparat Desa Leppe Kecamatan Soropia harus secara maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai program pembangunan rumah layak huni.

REFERENSI

- Amanah, Siti. 2010. Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Vol. 8, No. 1. Februari
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

- Idris, Adam. 2002. Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Program Pembangunan Bagi Masyarakat Perdesaan Di Era Otonomi. *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 2 No. 02 Maret
- Kholil, Syukur. 2017. Peran Komunikasi Pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sosial dan Keagamaan di Kota Langsa. *Al – Balagh*. Volume 1. Nomor 2. Juli – Desember
- Kifli, Gontom C. 2007. Strategi Komunikasi Pembangunan pada Komunitas Dayak di Kalimantan Barat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 25 No. 2, Desember
- Komala, Lukiati. 2014. Implementasi Model Komunikasi Kesehatan Two Step Flow Communication Dalam Menyebarkan Informasi Kesehatan Ibu Dan Janin Melalui Para Dukun Beranak Di Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. Volume 3, Nomor 1. Januari – Maret.
- Koswara, Iwan & Mulyana, Slamet. 2016. Implementasi Model Komunikasi Kelompok Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni. *Jurnal Kajian Komunikasi*. Vol. 4, No. 2, Desember
- Mongkito, Muhidin Sam; LM Umran; St. Harmin. 2019. Model Perencanaan Komunikasi Pemerintah dalam Penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Muna, *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 10 No.2 Agustus 2019
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nasution, Zulkarnaen. 1992. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan teori dan Penerapannya)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Nurhadi, Zikri Fachrul & Kurniawan, Achmad Wildan. 2017. Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 3, No.1. April.
- Prianto, E. 2005. Proseding “Fenomena Aktual Tema Doktoral Arsitektur dan Perkotaan”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ruslan, Rosady. 2002. *Manajemen Humas dan Komunikasi, Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2003. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsono. 2012. Peran Komunikasi Interpersonal dan Proses Sosialisasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota untuk Menciptakan Budaya Gaya Hidup yang Peduli Lingkungan. *Jurnal Universitas Multimedia Nusantara*. Vol. 4, No. 1.
- Sulaiman, Adhi Iman. 2013. Model Komunikasi Formal Dan Informal Dalam Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. Vol. 16, No. 2. Desember
- Zulfie, Syarief. 2000. *Kebijakan Pemerintah Dibidang Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Miskin*. Medan: USU Pers